



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR :112

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
SETIAP DESA KABUPATEN NIAS  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 35 Seri E);

14. Peraturan Bupati Nias Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 35 Seri E);
11. Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor 33 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Alokasi Daeran Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

*ADD setiap Desa = Pagu Alokasi Dasar + Pagu Alokasi Formula*

#### Pasal 4

(1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 80 % (delapan puluh per seratur) dari pagu Alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten Nias dengan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = 80 \% \times \frac{\text{Pagu ADD Kabupaten Nias}}{\text{Jumlah Desa Di Kabupaten Nias}}$$

(2) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan alokasi sebesar 20 % dari pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Nias yang dibagi dengan memperhatikan bobot variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

- (3) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Tata cara pembagian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 mempedomani Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Nias.
- (5) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENYALURAN ADD

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
  - b. tahap II sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I.
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa.

#### BAB IV PENGUNAAN ADD

##### Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk :
  - a. Belanja penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
  - b. Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Untuk belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), desa diberikan Bantuan Pendanaan penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

##### Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara desa sebagai wajib pungut dan setor pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V LAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan Semester II kepada Bupati.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati Nias.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 112 SERI : E**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020**  
**TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI**  
**DANA DESA (ADD) SETIAP DESA**  
**KABUPATEN NIAS TAHUN**  
**ANGGARAN 2020**

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA		PAGU ADD (RP)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
I	HILIDUHO	1	Ononamolo I Bot	263,727,616
		2	Dima	249,489,974
		3	Sinarikhi	268,146,327
		4	Ombolata Saloo	259,184,541
		5	Sisobalauru	269,776,143
		6	Tuhegafoa II	264,262,530
		7	Fadoro Lauru	276,097,376
		8	Lasara Tanoseo	266,533,749
		9	Hiliduho	244,907,822
		10	Hiligodu Tanoseo	255,641,051
		11	Sisobahili I Tan	258,798,927
		12	Onozitoli Dulu	246,481,176
		13	Mazingo Tanoseo	259,721,761
		14	Onowaembo Hiligara	243,280,166
		15	Silimabanua	256,888,795
		16	Ombolata Sisarahili	248,424,261
II	GIDO	1	Hilotalua	285,027,542
		2	Akhelauwe	270,935,502
		3	Hilisebua	283,462,801
		4	Somi	299,768,128
		5	Sirete	258,206,382
		6	Hiliweto Gido	281,857,304
		7	Lolo'anaa	256,249,012
		8	Sisobahili	285,941,683
		9	Lahemo	291,555,300
		10	Ladea	265,037,502
		11	Umbu	261,494,565
		12	Soewe	281,051,622
		13	Lolozasai	263,435,569
		14	Lasara Idanoi	304,952,253
		15	Lasela	259,535,272
		16	Ladea orahua	272,580,758
		17	Tulumbaho Saloo	270,396,854
		18	Nifolo'o Lauru	263,317,210
		19	Hilizoi	277,861,979
		20	Somi Botogo'o	275,225,411
		21	Olindrawa Sisarahili	291,732,761

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
III	IDANOGAWO	1	Hilimosio	283,104,308
		2	Tetegeona'ai	264,080,349
		3	Laowo Hilimbaruzo	361,175,331
		4	Hililawae	250,275,845
		5	Tuhewaeabu	263,370,454
		6	Sisobahili Iraono Hura	286,642,625
		7	Bozihona	268,070,253
		8	Oladano	273,813,448
		9	Ahedano	282,926,728
		10	Hilina'a Tafuo	314,655,847
		11	Hiliono Zega	250,689,031
		12	Mondrali	263,249,989
		13	Tetehosi	323,201,263
		14	Saiwahili Hiliadulo	269,924,886
		15	Maliwa'a	304,632,951
		16	Biouti	288,585,580
		17	Awoni Lauso	278,547,167
		18	Bobozoli Loloana'a	273,478,891
		19	Sandruta	261,715,715
		20	Laira	260,075,376
		21	Otalua	268,170,577
		22	Baruzo	272,258,094
		23	Orahili Zuzundrao	262,297,316
		24	Tiga Serangkai Maliwa'a	275,338,405
		25	Hiligogowaya Maliwa'a	276,787,620
		26	Hiliadulo	246,643,825
		27	Hilimoasio Dua	269,098,246
		28	Biouti Timur	254,410,468
IV	BAWOLATO	1	Sisarahili Bawolato	324,982,104
		2	Hiliganoita	278,039,751
		3	Gazamanu	286,251,603
		4	Hilihoru	298,022,325
		5	Hilialawa	259,642,296
		6	Hilifaosi	299,400,563
		7	Hiliwarokha	277,344,559
		8	Sitolubanua	296,313,030
		9	Siofaewali	296,758,301
		10	Sohaya	266,489,195
		11	Botohaenga	255,800,847
		12	Orahili	257,731,693
		13	Tagaule	275,227,329
		14	Siofabanua	302,436,595
		15	Sifaoroasi Uluhaou	288,460,876
		16	Dahana	286,929,887
		17	Orahua	277,413,219
		18	Banua Sibohou Silimaewali	282,615,736
		19	Siofaewali Selatan	268,233,235
		20	Lagasimahe	245,137,562

1	2	3	4	
		21	Hilihao Cugala	269,376,514
		22	Orahua Fondrato	262,156,085
		23	H o u	267,434,960
		24	Sindronro	249,376,849
		25	Balale Toba'a	253,718,154
V	HILISERANGKAI	1	Fadoro Hunogoa	273,209,974
		2	Lolofaoso Lalai	272,256,684
		3	Fulolo Lalai	255,587,395
		4	Lawa-Lawa	248,023,235
		5	Lalai I/II	276,501,837
		6	Lolowua	272,470,795
		7	Dahadano Botombawo	253,317,087
		8	Fadoro Lalai	245,119,771
		9	Lolowua Hiliwarasi	249,573,738
		10	Hilizialauru	260,012,541
		11	Ehosakhozi	278,229,814
		12	Awela	266,069,563
		13	Onombongi	271,225,552
		14	Orahili Idanoi	302,644,513
		15	Lolofaoso	274,265,936
VI	BOTOMUZOI	1	Hiligodu Botomuzoi	285,272,405
		2	Lasara Botomuzoi	271,086,799
		3	Hiliwaele I	268,795,644
		4	Hilimbowo Bot	250,535,234
		5	Simanaere Bot	289,442,224
		6	Hiliwaele II	249,278,525
		7	Tuhegafoa I	243,571,222
		8	Balohili Botomuzoi	245,205,629
		9	Hilihambawa Botomuzoi	262,873,315
		10	Fulolo Botomuzoi	260,463,054
		11	Loloana'a	254,831,688
		12	Ononamolo Talafu	259,672,093
		13	Sisobahili Dola	252,850,875
		14	Banua Sibohou Botomuzoi	253,532,246
		15	Mohili Berua Botomuzoi	255,369,882
		16	Tetehosi Botomuzoi	246,853,302
		17	Talafu	268,089,451
		18	Olanori	251,986,384

1	2	3	4	
VII	ULUGAWO	1	Orahili	251,303,184
		2	Hiiweto Gela	259,391,815
		3	Lawa Lawa Luo	253,972,790
		4	Hilimbowo	307,914,611
		5	Hilibadalu	271,106,278
		6	Fatodano	294,915,395
		7	Fahandrona	278,942,908
		8	Onodalinga	254,636,211
		9	Holi	311,712,011
		10	Sisobahili Ulugawo	277,807,412
		11	Sifaoroasi Ulugawo	293,762,320
		12	Mohili	272,538,869
		13	Hiligafao	256,819,254
		14	Sisarahili Soroma'asi	257,592,819
VIII	MA'U	1	Balodano	265,389,975
		2	Lewuoguru II	262,527,794
		3	Sihare'o III	287,354,319
		4	Sisarahili Ma'u	314,769,233
		5	Lasara Siwalubania	310,839,281
		6	Tuhemberua	273,923,405
		7	Atualuo	272,910,296
		8	Lewa Lewa	301,643,066
		9	Dekha	286,504,285
		10	Sihare'o III Bawosalo'o Berua	262,504,476
		11	Sihare'o III Hilibadalu	261,291,612
IX	SOMOLO-MOLO	1	Sisobawino I	257,996,778
		2	I'odano	263,984,609
		3	Huno	260,715,330
		4	Sisaratandrawa	255,563,047
		5	Somolomolo	277,459,647
		6	Lewuoguru I	272,585,685
		7	Sifaoroasi	254,317,112
		8	Lewuombanua	292,928,933
		9	Hiligodu Somolomolo	264,534,795
		10	Hilimborodano	257,264,744
		11	Soewali	268,326,780
X	SOGAEADU	1	Tuhembuasi	297,275,068
		2	Hilibadalu	282,975,325
		3	Lauri	306,828,194
		4	Hilimbana	273,524,336
		5	Saitagaramba	280,882,992
		6	Sogaeadu	263,889,388
		7	Baruzo	264,545,508



1	2	3	4
		8 Tulumbaho	282,114,612
		9 Sisarahili Sogaeadu	289,520,097
		10 We'a – We'a	257,381,799
		11 Sihareo Sogaeadu	297,287,714
JUMLAH TOTAL			46,235,696,000

BUPATI NIAS,  
 ttd  
 SOKHIATULO LAOLI



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020**  
**TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI**  
**DANA DESA (ADD) SETIAP DESA**  
**KABUPATEN NIAS TAHUN**  
**ANGGARAN 2020**

RINCIAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KADES DAN  
 PERANGKAT DESA DI KABUPATEN NIAS  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (RP)
1	2	3	4
I	HILIDUHO	1 Ononamolo I Bot	47,736,408
		2 Dima	72,456,754
		3 Sinarikhi	53,800,401
		4 Ombolata Saloo	47,736,408
		5 Sisobalauru	47,736,408
		6 Tuhegafoa II	47,736,408
		7 Fadoro Lauru	70,115,752
		8 Lasara Tanoseo	55,412,979
		9 Hiliduho	52,772,506
		10 Hiligodu Tanoseo	90,572,077
		11 Sisobahili I Tan	63,147,801
		12 Onozitoli Dulu	47,736,408
		13 Mazingo Tanoseo	86,491,367
		14 Onowaembo Hiligara	47,736,408
		15 Silimabanua	47,736,408
16 Ombolata Sisarahili	47,736,408		
II	GIDO	1 Hiliotalua	85,451,986
		2 Akhelauwe	47,736,408
		3 Hilisebua	47,736,408
		4 Somi	47,736,408
		5 Sirete	47,736,408
		6 Hiliweto Gido	47,736,408
		7 Lolo'ana'a	47,736,408
		8 Sisobahili	47,736,408
		9 Lahemo	54,657,828
		10 Ladea	47,736,408
		11 Umbu	47,736,408
		12 Soewe	47,736,408
		13 Lolozasai	47,736,408
		14 Lasara Idanoi	47,736,408
		15 Lasela	47,736,408
16 Ladea orahua	47,736,408		
17 Tulumbaho Saloo	47,736,408		
18 Nifolo'o Lauru	47,736,408		
19 Hilizoi	47,736,408		
20 Somi Botogo'o	47,736,408		
21 Olindrawa Sisarahili	47,736,408		

1	2	3	4
III	IDANOGAWO	1 Hilimosio	47,736,408
		2 Tetegeona'ai	47,736,408
		3 Laowo Hilimbaruzo	47,736,408
		4 Hililawae	47,736,408
		5 Tuhewaebu	47,736,408
		6 Sisobahili Iraono Hura	47,736,408
		7 Bozihona	47,736,408
		8 Oladano	47,736,408
		9 Ahedano	47,736,408
		10 Hilina'a Tafuo	47,736,408
		11 Hiliono Zega	47,736,408
		12 Mondrali	47,736,408
		13 Tetehosi	47,736,408
		14 Saiwahili Hiliadulo	47,736,408
		15 Maliwa'a	65,846,577
		16 Biouti	47,736,408
		17 Awoni Lauso	47,736,408
		18 Bobozioli Loloana'a	47,736,408
		19 Sandruta	47,736,408
		20 Laira	47,736,408
		21 Otalua	53,776,151
		22 Baruzo	47,736,408
		23 Orahili Zuzundrao	47,736,408
		24 Tiga Serangkai Maliwa'a	47,736,408
		25 Hiligoogowaya Maliwa'a	47,736,408
		26 Hiliadulo	47,736,408
		27 Hilimoasio Dua	47,736,408
		28 Biouti Timur	47,736,408
IV	BAWOLATO	1 Sisarahili Bawolato	94,030,224
		2 Hiliganoita	47,736,408
		3 Gazamanu	84,227,925
		4 Hilihuru	72,457,203
		5 Hilialawa	47,736,408
		6 Hilifaosi	47,736,408
		7 Hiliwarokha	47,736,408
		8 Sitolubanua	49,900,098
		9 Siofaewali	49,454,827
		10 Sohaya	47,736,408
		11 Botohaenga	47,736,408
		12 Orahili	47,736,408
		13 Tagaule	47,736,408
		14 Siofabanua	47,736,408
		15 Sifaoroasi Uluhaou	57,752,252
		16 Dahana	83,549,641
		17 Orahua	68,799,909
		18 Banua Sibohou Silimaewali	112,130,192
		19 Siofaewali Selatan	53,713,493
		20 Lagasimahe	52,542,766

1	2	3	4
		21 Hilihao Cugala	52,570,214
		22 Orahua Fondrato	47,736,408
		23 H o u	47,736,408
		24 Sindrondro	47,736,408
		25 Balale Toba'a	68,228,574
V	HILISERANGKAI	1 Fadoro Hunogoa	48,736,754
		2 Lolofaoso Lalai	47,736,408
		3 Fulolo Lalai	47,736,408
		4 Lawa-Lawa	47,736,408
		5 Lalai I/II	47,736,408
		6 Lolowua	47,736,408
		7 Dahadano Botombawo	68,629,641
		8 Fadoro Lalai	47,736,408
		9 Lolowua Hiliwarasi	47,736,408
		10 Hilizialauru	47,736,408
		11 Ehosakhozi	47,736,408
		12 Awela	47,736,408
		13 Onombongi	47,736,408
		14 Orahili Idanoi	47,736,408
		15 Lolofaoso	47,736,408
VI	BOTOMUZOI	1 Hiligodu Botomuzoi	47,736,408
		2 Lasara Botomuzoi	47,736,408
		3 Hiliwaele I	47,736,408
		4 Hilimbowo Bot	47,736,408
		5 Simanaere Bot	81,037,304
		6 Hiliwaele II	47,736,408
		7 Tuhegafoa I	47,736,408
		8 Balohili Botomuzoi	47,736,408
		9 Hilihambawa Botomuzoi	47,736,408
		10 Fulolo Botomuzoi	61,483,674
		11 Loloana'a	47,736,408
		12 Ononamolo Talafu	47,736,408
		13 Sisobahili Dola	47,736,408
		14 Banua Sibohou Botomuzoi	47,736,408
		15 Mohili Berua Botomuzoi	47,736,408
		16 Tetehosi Botomuzoi	47,736,408
		17 Talafu	47,736,408
		18 Olanori	47,736,408
VII	ULUGAWO	1 Orahili	47,736,408
		2 Hiiweto Gela	47,736,408
		3 Lawa Lawa Luo	47,736,408
		4 Hilimbowo	62,564,917
		5 Hilibadalu	47,736,408
		6 Fatodano	47,736,408
		7 Fahandrona	91,536,620
		8 Onodalanga	47,736,408
		9 Holi	47,736,408
		10 Sisobahili Ulugawo	47,736,408

1	2	3	4
		11 Sifaoroasi Ulugawo	47,736,408
		12 Mohili	49,407,859
		13 Hiligafoa	47,736,408
		14 Sisarahili Soroma'asi	88,620,309
VIII	MA'U	1 Balodano	47,736,408
		2 Lewuoguru II	47,736,408
		3 Sihare'o III	47,736,408
		4 Sisarahili Ma'u	47,736,408
		5 Lasara Siwalubanua	132,439,447
		6 Tuhemberua	72,289,723
		7 Atualuo	47,736,408
		8 Lewa Lewa	47,736,408
		9 Dekha	47,736,408
		10 Sihare'o III Bawosalo'o Berua	47,736,408
		11 Sihare'o III Hilibadalu	47,736,408
IX	SOMOLOMOLO	1 Sisobawino I	47,736,408
		2 I'odano	47,736,408
		3 Huno	47,736,408
		4 Sissaratandrawa	47,736,408
		5 Somolomolo	47,736,408
		6 Lewuoguru I	49,361,043
		7 Sifaoroasi	47,736,408
		8 Lewuombanua	47,736,408
		9 Hiligodu Somolomolo	57,411,933
		10 Hilimborodano	47,736,408
		11 Soewali	47,736,408
X	SOGAEADU	1 Tuhembuasi	47,736,409
		2 Hilibadalu	47,736,409
		3 Lauri	47,736,409
		4 Hilimbana	47,736,409
		5 Saitagaramba	47,736,409
		6 Sogae'adu	47,736,409
		7 Baruzo	47,736,409
		8 Tulumbaho	47,736,409
		9 Sisarahili Sogaeadu	48,925,415
		10 We'a - We'a	47,736,408
		11 Sihareo Sogaeadu	47,736,408
JUMLAH TOTAL			8,917,510,000

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA